

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Anwarul Ikhsan

NIM : C01207052

Fakultas/Jurusan : Syariah / Akhwalu Syakhsiyah

Judul Skripsi : ANNALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF TAMBAK
OLEH AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TIREM
KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN
GRESIK

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Muhammad Anwarul Ikhsan
NIM : C01207052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD ANWARUL IKHSAN ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Sekretaris,

Sanuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
Nip. 195708171985031001

Abd. Basith Junaidy, M.Ag
Nip. 197110212001121002

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Surabaya, Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana deskripsi penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. (2) Apa faktor penyebab penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan pola pikir deduktif dengan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan konkrit mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah di atas.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ibu Hj. Agem mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak yang masing-masing petak berukuran 5000 m² kepada desa Tirem tanpa mengundang sanak saudara serta petugas PPAIW dalam proses wakaf tersebut. Hal seperti itu, mengakibatkan terjadinya penarikan kembali disertai penjualan tanah wakaf tambak tersebut oleh keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan Ibu Hj. Agem. Hal tersebut juga didukung dengan tidak adanya pencatatan dari PPAIW setempat serta tambak yang diwakafkan masih belum dibalik nama oleh bapak H. Abu (suami dari ibu Hj. Agem). Adapun penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik menurut hukum Islam sebagaimana pendapat Imam empat madzhab adalah dilarang kecuali pendapat Abu Hanifah.

Diharapkan ahli waris pengganti supaya mengganti harta benda wakaf yang telah mereka jual kepada orang lain dengan harta yang setara dengan harta wakaf yang sebelumnya. Selain itu juga, dianjurkan bagi ahli waris pengganti memperbaiki silaturahmi dengan penduduk desa Tirem terutama bagi pihak-pihak yang dirasa telah dirugikan serta melakukan tobatan nasuha merupakan jalan yang terbaik guna memperbaiki silaturahmi kepada Allah SWT dan bagi ibu Hj. Agem sendiri apabila melakukan wakaf supaya melihat ahli waris yang lain yang masih hidup sehingga ahli waris tersebut dapat mendapatkan haknya sesuai apa yang telah diatur dalam hukum islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF DAN WARIS	
A. Wakaf.....	24
1. Pengertian Wakaf	24
2. Dasar Wakaf	26
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup di bumi baik tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah, ayat 5 yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ^١

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam syari'at Islam kedudukan wakaf digolongkan sebagai *ṣadaqah jāriyah*, yakni menyedekahkan harta yang bertujuan sebagai ibadah atau amal kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih bermanfaat. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari sahabat Abu Hurayrah :

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 599

Praktek wakaf yang belum dicatatkan dan kekhawatiran yang tidak diinginkan yakni penarikan kembali tanah wakaf yang berupa tambak telah terjadi di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Di desa tersebut terjadi penarikan kembali tanah wakaf tambak yang dilakukan oleh ahli waris pengganti yang mana merupakan keponakan-keponakan dari si wakif.

Awalnya, wakaf tambak di desa Tirem itu muncul dari inisiatif pasangan suami istri, bernama bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yang masih belum dikaruniai anak sampai diusianya yang sudah tua. Keinginan mewakafkan semua harta yang berupa 6 (enam) petak tambak yang masing-masing berukuran kurang lebih 5000 m² tersebut muncul dari benak bapak H. Abu yang disampaikan kepada istrinya, ibu Hj. Agem. Melihat keinginan bapak H. Abu yang baik tersebut, maka ibu Hj. Agem menyetujuinya, yang pada akhirnya bapak H. Abu menyampaikan niatnya tersebut kepada segenap pengurus ta'mir masjid setempat dan juga kepada segenap jajaran pamong desa Tirem. Akan tetapi sebelum bapak H. Abu merealisasikan niatnya, beliau terlebih dahulu meninggal dunia.

Ibu Hj. Agem yang merasa diberi amanat oleh suaminya, bapak H. Abu untuk mewakafkan semua harta yang berupa 6 (enam) petak tambak, maka ibu Hj. Agem pun merealisasikannya dengan mewakafkan semua tanah tambaknya kepada desa dengan mengundang perangkat desa, modin dan ta'mir masjid setempat yang tanpa mengundang sanak saudara dari bapak H. Abu dan ibu Hj.

Agem serta petugas yang berwenang yakni PPAIW setempat. Dalam penyerahan wakaf tersebut dilakukan dengan adanya hitam diatas putih bermatrai yang dibuat oleh desa tanpa adanya pencatatan dari PPAIW, hanya dilakukan dengan cara yang sederhana.

Wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir yang juga merupakan kepala desa Tirem, bapak Sumitro. Berita wakaf tersebut terdengar oleh keponakan-keponakan bapak H. Abu yang merupakan anak dari saudaranya, bernama bapak Darim yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan 6 orang anak yang masing-masing bernama, Ajib, Naim, Toha, Narmi, Marpiah serta Asmuka dan keponakan-keponakan ibu Hj. Agem dari saudaranya, bernama bapak Kasbola yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak yang masing-masing bernama, Jupri, Munti, Mangun, Pariani serta Bona. Selang beberapa hari, keponakan-keponakan bapak H. Abu yang diwakili oleh Toha dan ibu Hj. Agem yang diwakili oleh Jupri, Pariani serta Bona mendatangi ibu Hj Agem dengan tujuan untuk mempengaruhi ibu Hj. Agem supaya menarik kembali tambak yang telah diwakafkan ibu Hj. Agem kepada desa Tirem dengan harapan dikemudian hari keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem mendapatkan harta warisan.

Ibu Hj. Agem yang diindikasikan telah dipengaruhi oleh keponakan-keponakannya sendiri pun mendatangi rumah bapak lurah dengan tujuan ingin menarik kembali tanah tambak yang telah diwakafkannya, akan tetapi bapak

lurah yang sekaligus sebagai nadzir dalam penyerahan wakaf tambak yang dilakukan oleh ibu Hj. Agem mencegah penarikan dan tidak memberikannya.

Atas tidak dikabulkannya permintaan ibu Hj. Agem untuk dapat mengambil kembali tanah tambak yang telah diwakafkannya, maka beberapa hari kemudian perwakilan keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yakni Toha, Jupri, Pariani, dan Bona mendatangi sendiri rumah bapak lurah, dengan membawa pengacara guna mengambil kembali tanah tambak yang telah diwakafkan oleh ibu Hj. Agem. Dalam proses penarikan tersebut, pengacara yang disewa oleh keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem beralasan bahwa wakaf tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan wakaf tersebut belum dicatatkan pada petugas yang berwenang yakni PPAIW dan disamping itu juga, semua tanah tambak yang dibelinya dari orang lain, yang telah diwakafkan kepada desa belum dibalik nama oleh bapak H. Abu atas nama bapak H. Abu sendiri yakni masih atas nama pemilik pertama, orang lain yang menjual tanah tambaknya kepada H. Abu. Dalam hal ini diperkuat oleh anak dari pemilik pertama tambak tersebut, yang bekerja sama dengan keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem sehingga tidak dapat memperkuat bahwa tanah tambak yang diwakafkan adalah milik bapak H. Abu secara sempurna.

Atas dasar alasan-alasan yang disampaikan oleh pengacara yang disewa keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem, serta merasa takut

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bapak lurah pun secara spontan menyerahkan tanah tambak yang telah diwakafkan ibu Hj. Agem dengan terpaksa kepada keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem. Dari 6 (enam) petak tambak yang diwakafkan, hanya 5 (lima) petak tambak yang diambil oleh keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem dikarenakan terdapat 1 (satu) petak tambak yang tidak bersertifikat, sehingga 1 (satu) petak tambak yang tidak bersertifikat masih dikelola oleh desa sebagai tanah wakaf.

Setelah berhasil mengambil kembali tanah tambak wakaf, keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem langsung menjualnya kepada pihak lain dan hasil penjualan tanah tambak wakaf tersebut dibagi-bagikan kepada semua keponakan-keponakan yang lain baik dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem.

Dari deskripsi permasalahan di atas, penulis beranggapan bahwa bapak H. Abu yang memberikan amanat kepada Ibu Hj. Agem untuk mewakafkan semua tambaknya yang berjumlah 6 (enam) petak tambak kepada desa Tirem tanpa melihat bahwa masih terdapat ahli waris pengganti yang masih hidup yang mana ahli waris pengganti termasuk orang yang berhak mendapatkan harta warisan sehingga menyebabkan penarikan dan penjualan tanah wakaf tambak dirasa sangatlah menarik untuk dikaji dan penulis akan meneliti lebih lanjut lagi secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu,

Muhammad Fuadi dalam skripsinya pada tahun 2007 yang berjudul “*Study Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Ketawang Dalemnan Kec. Ganding Kab. Sumenep Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004.*”⁹

Dalam hasil penelitian ini, secara tidak langsung merupakan “gugatan” terhadap pihak terkait dan pemegang otoritas agar lebih intens

⁹ Muhammad Fuadi “Study Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Ketawang Daleman Kec. Ganding Kab. Sumenep Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004”, Seorang Mahasiswa jurusan Ahwal as-Syahsiyah Fakultas IAIN Sunan Ampel, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2007

Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*” guna melanjutkan penelitian yang sudah ada dan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti yang mana ahli waris pengganti dalam permasalahan ini merupakan anak dari saudara si wakif yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yangmana belum mendapatkan bagian warisan dari si wakif yang telah menyerahkan seluruh tambaknya yang berjumlah 6 (enam) petak tambak kepada desa Tirem tanpa menyisihkan hartanya untuk ahli waris pengganti yang masih hidup.

- b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi kaum akademisi dan masyarakat umum khususnya wakaf.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisian pada penelitian penulis yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*” yaitu :

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat beragama Islam.¹¹

Dalam masalah ini hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para fuqahā' yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis, antara lain yaitu pendapat Imam empat mazhab.

Penarikan : Proses untuk menarik tanah wakaf guna untuk mendapatkan harta warisan dari si wakif.

¹¹ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 12

Bab keempat berisi analisis mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dengan menggunakan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran tentang analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

- ## 2. Dasar Wakaf

a. Dasar hukum al-Qur'an

- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemanyah*, 91

2) Surat al-Baqarah ayat 267

بَتَائِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِعَاذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.²⁸

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walau hanya sebagai *tabarru'* saja.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak

²⁸ *Ibid.*, 74

3) Dewasa (*Baligh*)

4) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)

Akan tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang di bawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena dalam tujuan pengampunan tersebut yakni menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.²⁹

Benda-benda yang akan diwakafkan, agar mempunyai hukum yang pasti sebagai benda wakaf, maka benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, 22-23

1) Barang wakaf harus mempunyai nilai (harga)

Benda yang ada nilainya adalah benda yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu. Sedang benda yang tidak ada nilainya adalah benda yang tidak dapat dimanfaatkan baik dalam keadaan normal ataupun tertentu dan tidak dalam kepemilikan seseorang. Syariat juga tidak mengakui nilai dari harta itu dan tidak menjamin jika terjadi kerusakan, seperti hal-hal yang memabukkan dan yang telah diharamkan bagi umat Islam. Dengan demikian, harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh dijualbelikan serta dapat dimanfaatkan.

2) Benda wakaf harus jelas (diketahui)

Benda yang diwakafkan harus jelas diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu, meskipun *wāqif* mengatakan : “saya wakafkan sebagian dari harta itu”, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *wāqif* berkata ; “aku wakafkan salah satu dari kedua rumah ini”, namun tidak ditentukan rumah yang dimaksud.³⁰

³⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), 248-249

3) Benda wakaf harus milik *wāqif*(orang yang mewakafkan)

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkan, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapatkan wasiat untuk melakukan itu.

Fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan memenuhi syarat ini, menurut madzhab al-Maliki, benda yang akan diwakafkan tidak harus milik dari *wāqif* ketika dia mewakafkan hartanya. Jika *wāqif* mengatakan : “saya telah memiliki rumah itu, dan rumah itu akan menjadi wakaf”, kemudian orang itu pemiliknya, maka sah wakafnya. Sama halnya jika seorang berkata : “bahwa apa yang dibangun pada toko itu adalah wakaf”, kemudian toko itu dibangun, maka sah wakafnya, dan tidak lagi membuat satu pernyataan baru lagi. Beda dengan jumhur ulama’ (kebanyakan ulama) agar wakaf itu sah, maka benda yang akan diwakafkan harus benar-benar milik orang yang mewakafkan, jika bukan milik *wāqif*, wakafnya tidak sah.³¹

³¹ *Ibid.*, 251-253

Fuqaha berbeda pendapat mengenai mewakafkan benda yang bergerak (*al-manqūl*). Madzhab Hanafi menolak wakaf yang bergerak karena ada ketentuan yang dikenal di kalangan mereka “benda yang sah diwakafkan hanya yang tidak bergerak”. Ketentuan tersebut menjadi dasar yang paling berpengaruh dalam wakaf, adalah *ta’bid* (tahan lama). Namun demikian, madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak dalam beberapa hal, sebagai pengecualian dari prinsip tersebut.³³ Yaitu :

- ³² Wahbah Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh Vol. 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 763
³³ Muhammad Abu Zahrah, *Muha darat fi al-waqf*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005), 103

b) Apabila wakaf harta yang bergerak itu ada nas yang memperbolehkannya, seperti senjata dan kuda atau binatang-binatang yang digunakan untuk berperang. Seperti hadis riwayat Abu Hurayrah:

“Dari Abu Hurayrah berkata : Rasul Allah saw bersabda: Barang siapa yang mewakafkan kudanya (untuk berperang) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharap ridla Allah saw, maka makanan, kotoran, dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam pertimbangannya akan terdapat beberapa kebaikan.”³⁴

³⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol. 3*, (Beirut: Dar el Fikr, 1993), 204

Beda dengan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki, madzhab Syafi'i tidak memberikan batasan terhadap aset yang akan diwakafkan. Menurutny, barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa aset barang tidak bergerak maupun yang bergerak.³⁶ Menurut madzhab Hanbali, barang yang sah dijual belikan, sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah, sedang bentuk barangnya kekal.³⁷

Yang dimaksud dengan *mauqūf alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauqūf alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.

³⁷ Ali Fikri, *Al-Mu'amalah...*, 313

1) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauqūf alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan keyakinan *wāqif*. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu :

- a) Sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syiar-syiar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - b) Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
- 2) Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauqūf alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

³⁹ Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin* Vol. 4, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 387

2) Lafad sindiran (*kināyah*)

Lafad ini harus dibarengi dengan niat untuk mewakafkan seperti :

تصدقّت ، وحرمت ، وابدت .

*(Saya sedekahkan, saya haramkan, dan untuk selamanya)*⁴⁰

Lafad ini apabila digunakan, harus diikuti dengan niat wakaf. Sebab lafad *taṣaddaqtu* bisa berarti wakaf wajib seperti zakat dan sedekah sunat. Lafad *ḥarramtū* bisa berarti zihar, bisa juga wakaf. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Lafad *abbadtū* bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafad kiasan yang digunakan mewakafkan sesuatu harus disertai dengan wakaf secara tegas.⁴¹

Syarat-syarat sighth wakaf ada 5 (lima) macam :

a) Harus tegas dan jelas.

Para *fugaha* madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa statement (*shighat*) yang termasuk salah satu rukun wakaf. Statement ini harus disampaikan secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, transaksi wakaf tidak sah jika hanya sebatas janji-janji belaka. Karena janji-janji itu tidak mengandung kejelasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, 56

⁴¹ H. A. Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf...*, 27

Namun ternyata kedua aliran ini mempunyai titik temu bahwa statemen wakaf harus terjauhkan dari *khiyār* syarat (waktu untuk memilih setelah akad berlangsung). Sebagaimana dalam akad jual beli, maksud *khiyār* syarat dalam wakaf, misal : wakif memperoleh hak dengan mengatakan bahwa pada suatu saat ia berhak untuk menghentikan atau membatalkan wakaf.

Mayoritas *fuqaha* selain Malikiyah mensyaratkan statemen wakaf harus singkat. Singkat di sini mengandung arti tidak banyak komentar atau tambahan yang bertele-tele. Oleh karena itu, disyaratkan agar statemen wakaf harus singkat tanpa tambahan syarat yang tidak diperlukan.

Alasan kenapa statemen tersebut harus singkat, tidak lain karena wakaf sendiri mengandung makna pelimpahan kepemilikan, baik berupa manfaat atau barang. Yang dimaksud *ta'liq* (bergantung) adalah mengaitkan statemen wakaf dengan perkara lain (syarat) yang semu atau yang kepastiannya masih diragukan.

Seperti, jika seseorang mengatakan, “jika Allah menyembuhkan penyakitku atau jika saya mendapatkan uang dari si fulan, maka rumahku ini aku wakafkan untuk fakir miskin.” Dengan begitu, rumah tersebut tidak menjadi wakaf walaupun si wakif telah sembuh atau memperoleh uang.

c) Menunjukkan makna permanen.

Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai statemen yang permanen pada wakaf. Di antara mereka ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan. Karena itu ada di antara *fuqaha* yang membolehkan wakaf *muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah serta Hanafiyah kecuali Abu Yusuf pada suatu riwayat Hanabilah, Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan secara permanen (selamanya). Dan harus disertakan statemen yang menunjukkan makna tersebut.

Oleh sebab itu, wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (*mu'ajjalat*) adalah tidak sah. Misalnya seseorang berkata, “aku mewakafkan rumah ini kepada Zaid untuk jangka waktu dua tahun”.

d) Penyebutan pihak penerima wakaf (*Mauqūf Alaih*).

Fuqaha berbeda pendapat tentang syarat penyebutan penerima wakaf dalam *ṣighat* yang diucapkan, tujuannya agar sasaran pemanfaatan wakaf tersebut diketahui langsung. Perbedaan pendapat ini tidak terdapat pada status keberadaan pihak penerima wakaf, karena masalah ini *fuqaha* telah sepakat. Akan tetapi beda pendapat terdapat pada keharusan penyebutan penerima wakaf dalam *ṣighat* wakaf. Di antara mereka ada yang mensyaratkan penyebutannya secara transparan, dan ada di antara mereka yang tidak mensyaratkannya.

Pertama, pendapat yang mengharuskan penyebutan penerima wakaf dalam *ṣighat* wakaf. Pendapat ini adalah menurut madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanafi, yang mengharuskan penyebutan pihak penerima wakaf secara transparan dalam *ṣighat* wakaf,⁴² agar diketahui identitas dan hak penerimanya.

Jika si wakif berkata “saya mewakafkan kepada pihak mana saja yang dikehendaki Zayd”, maka wakafnya batal. Demikian juga, apabila ia berkata “saya wakafkan kepada pihak yang dikehendaki Allah swt”, wakaf ini batal karena tidak dapat diketahui pihak mana yang dikehendaki Allah swt.

⁴² Burhan al-Din, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, (Mesir: Al-Kubra, t.t.), 13

Berwakaf kepada pihak yang tidak diketahui tidak sah, seperti wakaf kepada seseorang yang tidak jelas, demikian menurut al-Shayrazi.⁴³ Yang dimaksud dengan pihak yang tidak diketahui yakni pihak yang tidak jelas identitasnya, Seyogyanya wakaf diberikan kepada pihak yang ditentukan oleh wakif, karena wakaf adalah pemindahan kepemilikan secara singkat, maka tidak dibolehkan wakaf kepada pihak yang tidak diketahui, seperti jual beli dan hibah.

Apabila si wakif berkata “saya mewakafkannya kepada seseorang atau pihak tertentu dari penerima wakaf, hal semacam ini dibolehkan dan penjelasannya digunakan sebagai rujukan. Akan tetapi, jika ia belum menentukan ketika wakaf, maka tidak dibolehkan. Sebab sekiranya pihak penerima wakaf telah ada dalam pikiran wakif, maka hal ini telah jelas, akan tetapi jika belum terbayang dalam pikiran wakif, berarti ia berwakaf kepada pihak yang belum jelas.

Kedua, tidak harus mencantumkan pihak penerima wakaf dalam *ṣighat* wakaf. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, madzhab Hanafi, madzhab Maliki. *Pertama*, Abu Yusuf tidak mensyaratkan penyebutan penerima wakaf, menurut dia wakaf seperti itu dianggap

⁴³ Al-Shayrazi, *Al-Muhadhdhab Vol. 1*, (Mesir: Isa al Babi al-Halabi, t.t.), 441

sah. Seperti ucapan wakif “tanahku ini diwakafkan”, maka keabsahan wakaf dengan kata “diwakafkan” saja, menurut Abu Yusuf adalah tergantung pada kebiasaan pemahaman yang berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang membatalkan wakaf dengan syarat seperti ini jika tidak ada kebiasaan yang menjelaskan pihak penerima wakaf.⁴⁴

e) Tidak disertai syarat yang bertentangan dengan ketentuan wakaf.

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa syarat-syarat dari wakif dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan wakaf, dan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan wakaf serta demi kepentingannya,⁴⁸ wajib hukumnya untuk dipenuhi. Pada prinsipnya

⁴⁸ Al-Nawawi, *Rawdat...*, 59

Madzhab Maliki membolehkan bagi wakif memberikan persyaratan yang dibolehkan, dan menurut mereka wajib hukumnya memenuhi syarat-syarat yang dibolehkan. Apabila wakif memberikan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan, maka tidak boleh dipenuhi. Golongan Zahiriyah mengkaitkan dengan segala permasalahan wakaf terhadap persepsi mereka, bahwa harta wakaf pindah dari kepemilikan wakif kepada Allah SWT, dan harta tersebut tidak akan kembali menjadi miliknya dengan alasan apapun. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa bentuk syarat apa saja serta kadar pertentangannya terhadap ketentuan wakaf tidak akan dapat mempengaruhi keabsahan wakaf.⁵⁰ Akan tetapi wakaf dianggap sah syaratnya dibatalkan, sebagaimana dalam masalah persyaratan penjualan wakaf.

⁵⁰ Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al Fikr al-Arabi, 2005), 136

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 13

“Dari Usman, bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah, sedang pada saat itu tidak air tawar kecuali sumur Rawmah, lalu Nabi bersabda : “Siapa yang mau membeli sumur Rawmah? Ia dapat mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga”. Kemudian sumur itu aku (Usman bin Affan) beli dengan kekayaan yang ada padaku”. (H.R. At-Tirmizi)⁵⁷

Mengenai kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), mereka mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ibnu Abbas R.A :

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata : setelah ayat tentang faraidl dalam surat An’ Nisa’ turun, Rasulullah saw bersabda : Tiada wakaf setelah turunnya surah An Nisa’”.

⁵⁷ Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi Vol. 5*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 393

⁶⁰ Al Bukhari, *Matn al-Bukhari Vol. 2*, (Jeddah: Al Haramayn, t.t.), 98

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل
مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده .

b. Penjualan Wakaf

1) Masjid

⁶¹ *Ibid.*, 97

Kedua, riwayat yang melarang penjualan masjid. Abu Bakar berkata : “Diriwayatkan dari Ali bin Sa’id : masjid tidak boleh dijual, yang diperbolehkan hanya pemindahan perlengkapan yang terdapat di dalamnya.”⁶⁵

Apabila masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya seperti, toko, rumah, berbagai tanaman, atau tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid serta upah bagi penjaganya, maka barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat

⁶⁵ *Ibid.*, 221

dikhawatirkan akan menghabiskan uang hasil penjualan sekaligus barang wakaf diakibatkan ketidakmampuan pengelola wakaf melunasi utangnya.

Madzhab Maliki menentukan tiga syarat diperbolehkan menjual wakaf : *Pertama*, apabila orang yang mewakafkan mensyaratkan agar barang yang diwakafkan itu dijual, sehingga persyaratan yang dia tetapkan harus diikuti. *Kedua*, bahkan barang yang diwakafkan tersebut termasuk jenis barang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya. Harga penjualan dapat digunakan untuk membeli barang yang sejenis. *Ketiga*, barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan. Sedangkan untuk keperluan selain itu tidakboleh dijual, bahkan hingga barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sekalipun.

Madzhab Syafi'i mengatakan :

“Menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apa pun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat berbagai macam alasan untuk itu. Mereka memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus apabila ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf boleh menebangnya dan menjadikan kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.”⁶⁸

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islami wa Adillatuh Vol. 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7679

Mengenai penelitian yang diangkat oleh penulis terdapat konsep waris. Sehingga penulis memasukkan landasan teori mengenai waris sebagai berikut :

1. Pengertian Waris

ورث , یرث , ارثاومیراثا

Kata waris dalam bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Sedangkan pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda atau yang lain.⁶⁹

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam dan pengalihan hak atas tanah

⁶⁹ M. Ali Al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 40

- a. Surat an-Nisā', ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا

70 مَفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

- b. Surat an-Nisā', ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ^طرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا^ط مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ج وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ط مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ^ط أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي^ط بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ج ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^ج فَرِيضَةٌ^ط مِّنَ اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٧١

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 116

⁷¹ *Ibid.*, 116-117.

c. Surat an-Nisā', ayat 12 :

[illegible]

فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوسَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ

72  مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”*

d. Surat an-Nisā', ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ

73 شَيْءٌ شَهِيدٌ 

⁷² *Ibid.*, 117

⁷³ *Ibid.*, 122-123

e. Surat an-Nisā', ayat 176 :

Artinya : *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

⁷⁴ *Ibid.*, 153

3. Rukun dan Syarat Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu :

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal baik secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *taqdiry* berdasarkan perkiraan
- b. *Al-Waris* atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya *al-muwarris* dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi didalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (konstraksi) atau cara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan.
- c. *Al-Maurus* atau *Al-Miras* yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁷⁵

⁷⁵ Drs. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22-23

1) Pernikahan

Dari sebab pernikahan ada dua ahli waris yaitu :

Suami dan Istri

2) Perbudakan

Dari sebab perbudakan, ada dua golongan, yaitu :

a) Maula mu'tiq

b) *Ashabah li maula mu'tiq*, meninggalkan warisan ketika maula mu'tiq meninggal dunia

c. *Ahli Waris Dzawil Arham*

Adalah ahli waris perempuan atau ahli waris yang hubungannya dengan *muwarris* diantarkan oleh ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Mereka adalah ahli waris kerabat yang bukan termasuk *ashabul furud* dan *ashabah*.⁷⁶

5. Ashabah

Yakni setiap orang yang memperoleh *tirkah* ketika dia sendirian dengan *tirkah* tersebut, atau memperoleh harta yang disisakan oleh *ashabul furudh*. Jika tidak tersisa setelah mereka maka *ashabah* tidak mewarisi sama sekali. Maka dalam tingkatan, mereka setelah *ashabul furudh*.

Ashabah dibagi menjadi dua : *ashabah sababi* dan *ashabah nasab*

a. *Ashabah Sababi*

⁷⁶ “Macam-Macam Ahli Waris,” dalam [http:// nuravic.file.wordpress.com](http://nuravic.file.wordpress.com) (11 Agustus 2011)

Urutan *ashabah* orang yang memerdekakan yaitu anak laki-laki dari orang yang memerdekakan adalah orang yang paling berhak dengan *ashabah*, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, meskipun terus kebawah, kemudian ayahnya, kakeknya meskipun sampai ke atas.

Adalah laki-laki kerabat mayit, yang antara mereka dengan mayit tidak ada perempuan seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan paman, anak perempuan dengan saudara laki-lakinya, saudara perempuan dengan anak perempuan. Mereka mewarisi apa yang disisakan oleh *dzawil furudh*. Jika ada perempuan antara mereka dengan mayit maka orang itu termasuk *dzawil arham*, seperti ayahnya ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, atau termasuk *dzawil furudh* seperti saudara laki-laki seibu.⁷⁷

1) *Ashabah bin-Nafsi* (menjadi ashabah dengan dirinya sendiri, dan nasabnya tidak tercampur unsure wanita)

⁷⁷ Wabbah Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami...*, 416

Ashabah bil ghair hanya terbatas pada empat orang ahli waris yang semuanya wanita yaitu

- a) Anak perempuan, baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan anak laki-laki (saudara laki-laki)
 - b) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, baik ia saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya.
 - c) Saudara perempuan sekandung, baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan saudara laki-laki sekandung (saudara laki-lakinya)
 - d) Saudara perempuan seayah, baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan saudara laki-lakinya seayah (saudara laki-lakinya)
- 3) *Ashabah ma'al Ghair* (menjadi *ashabah* bersama-sama dengan yang lain)

Yakni, setiap perempuan yang menjadi *ashabah* karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain. Dia hanya mempunyai dua keadaan yakni saudara perempuan sekandung maupun saudara

perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan kelompok *furu'* dari pihak perempuan.⁸⁰

1. Letak Geografis

Di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik memiliki batas wilayah kelurahan yang berbatasan dengan desa/kelurahan lain, diantaranya sebagai berikut :

Batas-batas desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.⁸²

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Ambeng-Ambeng Watang Rejo	Duduk Sampeyan
Sebelah Selatan	Padeg	Cerme

[illegible]

Tabel. II

Jumlah Pengangguran di Desa Tirem.⁸⁶

No.	Uraian	Keterangan
01.	Jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja	7 orang
02.	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15-55 Tahun	116 orang
	Jumlah	123 orang

Dilihat dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa mata pencarian masyarakat di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik adalah beraneka ragam, namun demikian penduduk yang belum bekerja (pengangguran) yakni sekitar 7 orang, lalu yang sudah memiliki pekerjaan sekitar 116 orang. Yang paling banyak pekerjaan yang dilakukan penduduk di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik adalah pekerjaan PETANI yakni sekitar 85 orang

3. Keadaan Sosial Agama dan Pendidikan

Di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terdapat juga keadaan sosial yang menyangkut mengenai keagamaan penduduk desa setempat. Kebanyakan penduduk desa Tirem memeluk agama Islam. Hal itu dapat dilihat akan keberadaan tempat peribadatan didalam desa tersebut, baik itu berupa masjid, maupun musholla, selain keadaan sosial keagamaan di desa Tirem juga dapat diketahui melalui kegiatan keagamaan antara lain :

⁸⁶ *Ibid.*

- Istighosah
- Tahlil
- Yasinan
- Sholawat Diba'
- Pengajian Rutin Malam Jum'at

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sosial keagamaan di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dapat diketahui data-data mengenai tempat ibadah di desa Tirem melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. I

Tempat Peribadatan di Desa Tirem.⁸⁷

No.	Sarana Peribadatan	Keterangan
01.	Masjid	Ada
02.	Musholla	Ada
03.	Gereja	Tidak Ada
04.	Wihara	Tidak Ada
05.	Pura	Tidak Ada

Dari tabel tersebut dapat ditelusuri bahwa rumah peribadatan yang ada di desa Tirrem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik keseluruhan penduduk di desa Tirem di dominasi oleh rumah peribadatan umat islam,

⁸⁷ *Ibid.*

sedangkan data yang mengenai keadaan pemeluk agama di desa Tirem tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. II

Jumlah Pemeluk Agama di Desa Tirem.⁸⁸

Diploma ataupun Strata. Mengenai tingkat pendidikan yang telah dijalani oleh masyarakat/penduduk desa setempat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. III
Pendidikan Penduduk deesa Tirem.⁸⁹

2. Kronologis Penarikan Tanah Wakaf Tambak

Proses penyerahan tanah wakaf tambak yang telah dilaksanakan oleh ibu Hj. Agem dengan tidak mengundang sanak saudara, terdengar di telinga keponakan-keponakan mereka, baik anak dari saudara bapak H. Abu yang bernama bapak Darim yang telah meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama, Ajib, Naim, Toha, Narmi, Marpiah serta Asmuka dan anak dari saudara ibu Hj. Agem, bernama bapak Kasbola yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama, Jupri, Munti, Mangun, Pariani serta Bona.

Ibu Hj. Agem yang menyerahkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak tanpa menyisakan sebagian hartanya membuat keponakan-keponakannya jengkel. Keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yang merasa jengkel dengan perbuatan ibu Hj. Agem yang menyerahkan seluruh hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak untuk diwakafkan tanpa menyisakan sedikitpun hartanya untuk mereka. Kemudian keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yang merasa jengkel dengan perbuatan yang dilakukan ibu Hj. Agem mendatangi rumah ibu Hj. Agem yang diwakili Toha, Jupri, Pariani, serta Bona. Mereka

berempat mencoba mempengaruhi ibu Hj. Agem supaya menarik kembali seluruh wakaf tanah tambak yang telah diwakafkannya.⁹⁶

ini dihadiri oleh perangkat desa, modin dan segenap para ta'mir masjid setempat yang mana perwakafan ini ditujukan untuk masjid setempat

4. *Shighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya), dalam perwakafan ini sighat dilakukan oleh ibu Hj. Agem dengan disertai hitam di atas putih yang dibuat oleh perangkat desa setempat yang isinya memperkuat adanya perwakafan yang dilakukan oleh si wakif, ibu Hj. Agem.

Jadi apabila salah satu dari keempat rukun wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka wakaf tersebut dianggap tidak sah.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf”. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini mengalami kebekuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum angka I sebagai berikut :

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum

lain dan sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan mewariskan.¹⁰³

Dalam kasus penelitian ini, yakni di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Seharusnya keponakan-keponakan dari si wakif mendapatkan bagian harta dari harta yang telah diwakafkan sebagai ashobah bil ghair yakni bagian sisa. Walaupun begitu menurut hukum Islam, perbuatan wakaf sudah dinyatakan sah dan tidak terdapat hal yang dapat membatalkan wakaf karena perbuatan wakaf yang dilakukan ibu Hj. Agem telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Akan tetapi dalam undang-undang tentang wakaf yang dibuat oleh pemerintah, perbuatan wakaf yang tidak dicatatkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila terjadi sesuatu ataupun kekhawatiran yang tidak diinginkan maka wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan walaupun dalam perbuatan wakaf yang dilakukan oleh ibu Hj. Agem menggunakan hitam di atas putih bermaterai yang dibuat secara sederhana oleh desa setempat sebagai bukti bahwa tanah tambak tersebut telah diwakafkan ibu Hj. Agem kepada desa Tirem.

Bukti wakaf seperti itu dirasa masih belum cukup apabila dalam proses penyerahan harta benda wakaf tidak mengundang dan mencatatkannya di PPAIW setempat. Sehingga apabila terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang

¹⁰³ *Ibid.*, 37

tidak diinginkan setelah wakaf, wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi dengan hanya menggunakan bukti hitam diatas putih bermatrai yang dibuat oleh desa setempat kurang mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diinginkan terutama penarikan kembali tanah wakaf. Sehingga apabila ingin melakukan perlawanan (gugatan) ke pengadilan agama atas kekhawatiran tersebut perlu adanya pencatatan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang yakni Petugas Pencatatan Akta Ikrar Wakaf.

B. Analisis terhadap sebab-sebab terjadinya Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak oleh Ahli Waris Pengganti di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Perbuatan wakaf merupakan perbuatan yang sangat mulia baik di mata Allah SWT maupun di mata manusia sendiri. Adapun sebab-sebab penarikan kembali tanah wakaf yang berupa 6 (enam) petak tambak yang dilakukan oleh anak-anak dari saudara si wakif yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan si wakif mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak tanpa menyisakan harta bendanya sedikitpun untuk keponakan-keponakannya.

Dalam hal ini, keponakan-keponakan si wakif dalam proses penarikan kembali tanah wakaf tersebut juga di dukung dengan tidak dicatatkannya wakaf

kepada pihak yang berwenang yakni PPAIW setempat, serta harta benda wakaf yang berupa 6 (enam) tambak yang semuanya masih beratas namakan pemilik pertama yakni orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu, masih belum di balik nama oleh H. Abu sendiri menjadikan kesempatan bagi keponakan-keponakan si wakif untuk dapat menarik kembali tanah wakaf yang telah di wakafkan untuk desa Tirem.

Pencatatan harta benda wakaf kepada petugas yang berwenang yakni PPAIW setempat sangatlah penting untuk dilakukan bagi seseorang yang ingin mewakafkan harta bendanya. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang tentang Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur semua perbuatan wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf”. Peraturan tersebut mengatur semua perbuatan wakaf terutama menganjurkan bagi si wakif untuk mencatatkan perbuatan wakafnya kepada PPAIW setempat. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini mengalami kebekuan.

Mengenai anjuran pencatatan sendiri telah disebutkan dalam penjelasan umum angka I dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang

berwenang yakni PPAIW setempat juga terdapat faktor pendukung yang lain yakni belum dibalik nama harta yang telah diwakafkan dari pemilik pertama, orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu atas nama bapak H. Abu sendiri.

Dalam permasalahan ini, keponakan-keponakan si wakif meminta bantuan kepada anak dari pemilik pertama dikarenakan pemilik pertama, orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu telah meninggal dunia dengan cara memberikan imbalan yang setimpal kepada anak dari pemilik pertama atas tanah tambak yang masih beratas namakan orang tuanya. Imbalan tersebut akan diberikan apabila anak dari pemilik pertama apabila mau membantu keponakan-keponakan si wakif dalam proses penarikan tanah wakaf yang berupa 6 (enam) petak tambak dari desa Tirem.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak oleh Ahli Waris Pengganti.

Mengenai penarikan kembali tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris pengganti yang mana merupakan keponakan-keponakan sendiri si wakif di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dikarenakan si wakif yakni ibu Hj. Agem tidak memberikan sedikitpun hartanya kepada keponakan-keponakannya yang masih hidup, yangmana seharusnya mendapatkan sebagian dari harta yang telah diwakafkan oleh si wakif sebagai *ashabah bil ghair*. Akan tetapi si wakif mewakafkan semua hartanya yang berupa (enam) petak tambak

Harta tersebut berupa 6 (enam) petak tambak bukanlah merupakan wasiat karena awal mulanya hanya sebuah rencana dari bapak H. Abu yang dirembukkan dengan ibu Hj. Agem, istrinya yang masih belum dilaksanakan oleh bapak H. Abu, sehingga masih dianggap sebuah rencana. Seharusnya harta tersebut berupa 6 (enam) petak tambak tidak diberikan semua kepada desa setempat, akan tetapi seharusnya dibagikan kepada ahli waris-ahli waris yang masih hidup.

Dalam hukum Islam, wakaf dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni wakaf *adh-dhuhri* (wakaf keluarga) dan wakaf *al-khayri* (wakaf umum) yang mana

Dengan tidak dikabulkannya keinginan dari ibu Hj. Agem oleh bapak lurah tersebut. Maka selang beberapa hari kemudian, keponakan-keponakannya sendiri secara bersama-sama yang diwakili oleh Toha, Jupri, Pariani serta Toha mendatangi rumah bapak Sumitro yang merupakan nadzir dari wakaf tersebut. Mereka berempat mendatangi rumah bapak Sumitro dengan membawa pengacara yang telah disewa oleh mereka. Dalam upaya penarikan tersebut, pengacara yang disewa oleh keponakan-keponakan si wakif beranggapan bahwa wakaf tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan perbuatan wakaf tersebut tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang yakni PPAIW setempat dan disamping itu, semua tambak yang telah diwakafkan oleh ibu Hj. Agem belum dibalik nama oleh bapak H. Abu, masih atas nama pemilik pertama sehingga tidak dapat memperkuat bahwa tambak yang diwakafkan ibu Hj. Agem adalah milik bapak H. Abu (suami ibu Hj. Agem) secara sempurna.

Dengan didasari atas alasan-alasan yang diutarakan oleh pengacara yang disewa oleh keponakan-keponakan si wakif dan rasa takut apabila terjadi sesuatu pada dirinya (bapak Sumitro) dan keluarga, maka bapak Sumitro menyerahkan semua tanah tambak yang telah diwakafkan oleh ibu Hj. Agem kepada keponakan-keponakannya. Kemudian setelah berhasil menarik kembali harta wakaf tersebut, keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem tersebut menjual semua tambak dan membagi-bagikan hasil penjualannya tersebut kepada keponakan-keponakan yang lain.

Dari situ dapat kita ketahui bahwa perwakafan yang dilakukan oleh ibu Hj. Agem kedudukannya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan wakaf tersebut. Sehingga penarikan kembali yang dilakukan oleh keponakan-keponakan si wakif yang diwakili oleh Toha, Jupri, Pariani serta Toha dilarang oleh agama Islam atau haram dilakukan. Mengenai status dari tanah tambak yang ditarik kembali oleh keponakan-keponakannya sudah beralih kepada orang lain yakni bapak H. Rofik, orang yang telah membeli tambak wakaf tersebut.

- Akan tetapi, perwakafan tersebut sudah sah menurut hukum islam sehingga tidak diperbolehkan atau dilarang oleh ulama madzhab selain madzhab Abu Hanifah.

1. Kepada ahli waris pengganti supaya mengganti harta benda wakaf yang telah mereka jual kepada orang lain dengan harta yang setara dengan harta yang sebelumnya. Serta dianjurkan untuk memperbaiki silaturahmi dengan penduduk desa Tirem terutama bagi pihak-pihak yang dirasa telah dirugikan serta melakukan tobatan nasuha merupakan jalan yang terbaik guna memperbaiki silaturahmi kepada Allah swt.
2. Bagi ibu Hj. Agem supaya memperhatikan ahli waris yang masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, Beirut, Dar al Fikr al-Arabi, 2005
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, Bandung, Al-Ma'arif, 1987
- Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Vol. 3*, Beirut, Dar el Fikr, 1993
- Burhan al-Din, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, Mesir, Al-Kubra, t.tp
- Faishal Haq dan Ahmad Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 1993
- Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Depok, Papas Sinar Sinarti, 2005
- Ibn Hammam, *Fath Al-Qadir, Vol. 5*, Mesir, Mustafa Muhammad, t.tp
- Juhaya S. Praja, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung, Yayasan Piara, 1995
- Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dhu'afa, 2004
- Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 1999
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988
- Muslim, *Al-Jami' al-Sahih, Vol.5*, Beirut, Dar al-Fikr, 1993
- Al-Muslim, *Sahih Muslim, Vol.2*, Bandung, Dahlan, t.t
- Al-Nawawi, *Rawadat al-Talibin, Vol. 4*, Beirut, Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992

